

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Melaju Ratangga hingga Ancol Barat

PT MRT sempat mengkaji lokasi lain untuk depo di Kampung Bandan, Ancol Timur dan di lahan Jakarta International Stadium.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Penetapan lokasi depo kereta moda raya terpadu (MRT) sudah final: di Ancol Barat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menyepakati hasil kajian teknis, kelayakan, dan struktur tanah pada lahan di Pademangan, Jakarta Utara, tersebut. "Sudah disetujui Kementerian Perhubungan," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, kemarin.

Polemik lokasi tempat perawatan kereta itu mencuat saat PT MRT Jakarta mengajukan pertimbangan mencari cara pembebasan lahan di Ancol Barat yang memakan dana hingga Rp 1,5 triliun. Hal ini disampaikan karena anggaran pembebasan lahan tersebut belum bisa dicairkan setelah merosotnya angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta (APBD) 2020 akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis, mempersoalkan alasan PT MRT Jakarta dan pemerintah DKI memindahkan lokasi depo Ratangga—sebutan bagi kereta MRT—dari

Kampung Bandan ke Ancol Barat. Di Ancol Barat, dia melanjutkan, PT MRT Jakarta nantinya harus menyewa kepada PT Asahimas Flat Glass yang memegang izin hak guna bangunan (HGB) atas lahan seluas 40 hektare tersebut.

Kata Azis, masa berlaku HGB PT Asahimas terhadap lahan milik PT Pembangunan Jaya Ancol tersebut akan habis antara 2022 dan 2029. Menurut dia, DPRD akan memberikan persetujuan setelah PT MRT Jakarta memberikan kajian secara gamblang soal keuntungan pemilihan lokasi di Ancol Barat dibanding lokasi alternatif lainnya.

Dia mengatakan DKI harus memperjelas status hak guna bangunan di lahan kosong tersebut. "Jangan sampai nanti (MRT) bangun, lalu harus bayar. Ini merugikan. Tanah milik Pemprov DKI, tapi harus bayar," kata Azis.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan penetapan lahan Ancol Barat sudah melalui studi kelayakan yang

akan diperiksa pemberi pinjaman dana, Japan International Cooperation Agency (JICA), pada November mendatang. MRT tengah menuntaskan proyek pembangunan rute perdana fase II, Bundaran HI-Ancol. JICA akan mulai mencairkan dana pinjaman jika PT MRT Jakarta sudah memiliki kepastian lokasi depo. "Lahannya bisa menampung 32 rangkaian kereta MRT dilengkapi test track dan infrastruktur lainnya," kata dia.

Menurut William, PT MRT memiliki alternatif lokasi, yaitu perluasan lahan di Ancol Timur. Akan tetapi dia menilai lahan tersebut berbentuk kotak yang tak cocok untuk pembangunan rel kereta—seharusnya persegi panjang. Selain itu, akses menuju lokasi mengharuskan kereta melakukan manuver saat masuk. PT MRT juga sempat melirik lahan pemerintah DKI di Papanggo, Tanjung Priok, yang kemudian dite-

tapkan menjadi lokasi Jakarta International Stadium (JIS).

MRT mencoret Kampung Bandan, kata William, karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemilik lahan belum menyelesaikan masalah dengan tiga perusahaan pengembang di lokasi tersebut hingga akhir 2019. Belakangan, perusahaan negara itu justru menggunakan tanah tersebut sebagai rumah bagi 200 kereta mereka.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir, membenarkan perusahaannya memiliki lahan seluas 43 hektare di Ancol Barat yang terbagi menjadi 10 HGB. Menurut dia, tujuh HGB seluas 40 hektare dipegang PT Asahimas dan tiga lainnya seluas 3 hektare oleh PT Jakarta Propertindo. Dia mengatakan masa berlaku HGB PT Asahimas bervariasi dengan periode 2022-2029. "Pada dasarnya, Ancol mendukung kebijakan Pemprov DKI," kata dia.

● FRANCISCO ROSARIANS